

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA

Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2022;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			





3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			





8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARGA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT





MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp5.734.417.499.951 (Lima Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp310.235.129.644 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp6.044.652.629.595 (Enam Triliun Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp5.392.933.970.527
- b. Bertambah/(berkurang) Rp 265.558.074.561

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp5.658.492.045.088

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp5.684.417.499.951
- b. Bertambah/(berkurang) Rp 310.235.129.644

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp 5.994.652.629.595





3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp341.483.529.424
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp 44.677.055.083

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp386.160.584.507

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			



b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp50.000.000.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  
Rp50.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  
Rp336.160.584.507

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  
bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp2.672.831.356.527  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 210.397.467.561

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  
Rp 2.883.228.824.088

b. Pendapatan Transfer

- 1) Semula Rp2.660.721.446.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.133.737.000

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  
Rp2.715.855.183.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp59.381.168.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.870.000

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan  
Rp59.408.038.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp2.343.271.581.063  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 83.890.156.378

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.427.161.737.441

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANANGSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp13.447.743.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.134.255.000)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9.313.488.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp96.368.227.301

2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.657.444.277

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp101.025.671.578

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Semula Rp219.743.805.163

2) Bertambah/(berkurang) Rp125.984.121.906

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp345.727.927.069

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp2.660.721.446.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.133.737.000

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.715.855.183.000

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp59.381.168.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.870.000

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp59.408.038.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp3.605.734.765.576

2) Bertambah/(berkurang) Rp 104.728.224.955

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Ola</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>p</i>

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp3.710.462.990.531

b. Belanja Modal

1) Semula Rp896.649.751.630

2) Bertambah/(berkurang) Rp182.048.291.170

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.078.698.042.800

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 30.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 20.149.495.946)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp9.850.504.054

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp1.152.032.982.745

2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.608.109.465

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.195.641.092.210

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.634.880.100.472

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 32.182.610.040)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 1.602.697.490.432

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp1.733.927.884.170

2) Bertambah/(berkurang) Rp 111.040.364.931

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp1.844.968.249.101

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp229.333.078.852





2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.005.379.064

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp254.338.457.916

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp7.593.702.082

2) Bertambah/(berkurang) Rp 865.091.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  
Rp8.458.793.082

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,  
terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp2.771.900.904

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 402.484.900)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp2.369.416.004

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp137.774.868.819

2) Bertambah/(berkurang) Rp 95.641.030.839

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp233.415.899.658

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp390.351.866.782

2) Bertambah/(berkurang) Rp 47.773.938.974

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Setelah

perubahan Rp438.125.805.756

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp315.419.087.554

2) Bertambah/(berkurang) Rp 37.922.672.737

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah

perubahan Rp353.341.760.291

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp49.814.076.471

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.091.693.520

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp50.905.769.991

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp517.951.100

2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.440.000

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp539.391.100

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGGA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp30.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp20.149.495.946)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp9.850.504.054

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.089.637.982.745

2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.523.109.465

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp1.148.161.092.210

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp62.395.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp14.915.000.000)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp47.480.000.000

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp341.483.529.424

2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.677.055.083

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp386.160.584.507

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp50.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp50.000.000.000





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
    - 1) Semula Rp341.483.529.424
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.677.055.083Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp386.160.584.507
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah
    - 1) Semula Rp50.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp \_\_\_\_\_ 0Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp50.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			



- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran IV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

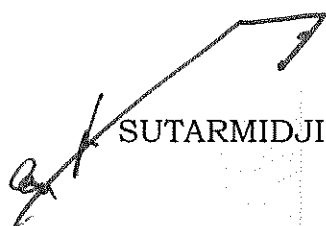
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 8-11-2022  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,  
Pada tanggal 8-11-2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HARISSON  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT:  
9-223 /2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
 Nomor : 4 Tahun 2022  
 Tanggal : 08 November 2022

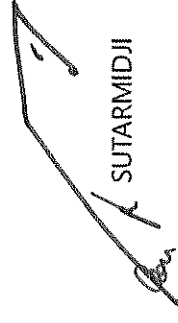
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan				
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.672.831.356.527</b>		<b>2.883.228.824.088</b>	<b>210.397.467.561</b>	<b>8 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063		2.427.161.737.441	83.890.156.378	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000		9.313.488.000	(4.134.255.000)	31 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301		101.025.671.578	4.657.444.277	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163		345.727.927.069	125.984.121.906	57 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.660.721.446.000</b>		<b>2.715.855.183.000</b>	<b>55.133.737.000</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000		2.715.855.183.000	55.133.737.000	2 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>59.381.168.000</b>		<b>59.408.038.000</b>	<b>26.870.000</b>	<b>0 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000		59.408.038.000	26.870.000	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.392.933.970.527</b>		<b>5.658.492.045.088</b>	<b>265.558.074.561</b>	<b>5 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.605.734.765.576</b>		<b>3.710.462.990.531</b>	<b>104.728.224.955</b>	<b>3 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472		1.602.697.490.432	(32.182.610.040)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170		1.844.968.249.101	111.040.364.931	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852		254.338.457.916	25.005.379.064	11 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082		8.458.793.082	865.091.000	11 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>896.649.751.630</b>		<b>1.078.698.042.800</b>	<b>182.048.291.170</b>	<b>20 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904		2.369.416.004	(402.484.900)	15 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819		233.415.899.658	95.641.030.839	69 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782		438.125.805.756	47.773.938.974	12 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554		353.341.760.291	37.922.672.737	12 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471		50.905.769.991	1.091.693.520	2 %

KASO  
 HUKUM  
 KASUBIDAN  
 PEMERINTAH DAERAH  
 ASISTEN I SEKDA  
  
 M

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	539.391.100	21.440.000	4 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>9.850.504.054</b>	<b>(20.149.495.946)</b>	<b>67 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	67 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.152.032.982.745</b>	<b>1.195.641.092.210</b>	<b>43.608.109.465</b>	<b>4 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	58.523.109.465	5 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	47.480.000.000	(14.915.000.000)	24 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.684.417.499.951</b>	<b>5.994.652.629.595</b>	<b>310.235.129.644</b>	<b>5 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(291.483.529.424)</b>	<b>(336.160.584.507)</b>	<b>(44.677.055.083)</b>	<b>-15 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>341.483.529.424</b>	<b>386.160.584.507</b>	<b>44.677.055.083</b>	<b>13 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>291.483.529.424</b>	<b>336.160.584.507</b>	<b>44.677.055.083</b>	<b>15 %</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Gubernur Kalimantan Barat

 SUTARMIDJI



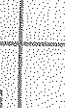

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja			
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Belanja Tak Terduga		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Belanja Tak Terduga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	161.972.260.000	2.457.010.457.833	825.271.139.043	0	3.282.281.596.876	275.929.143.999	2.544.141.858.614	995.920.203.981	0	3.540.062.062.595
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	264.400.000	1.173.458.088.751	344.116.936.241	0	1.517.575.024.992	164.400.000	1.185.108.612.148	352.560.407.527	0	1.537.669.019.675
1 01 1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000	1.171.641.733.888	344.028.927.400	0	1.515.670.661.288	100.000.000	1.183.369.421.113	352.536.955.727	0	1.535.906.356.840
1 01 1.01.2.22	UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01	UPT MUSEUM	64.400.000	1.816.354.863	88.008.841	0	1.904.363.704	64.400.000	1.739.191.035	23.471.800	0	1.762.662.835
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	161.707.860.000	625.548.407.094	102.381.974.929	0	727.930.382.023	275.764.743.999	646.832.924.531	192.055.215.736	0	838.888.140.267
1 02 1.02	DINAS KESEHATAN	604.860.000	210.728.096.171	262.917.665	0	210.991.013.836	9.000.000	140.708.290.972	726.989.765	0	141.435.280.737
1 02 1.02.0.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN	450.000.000	2.083.345.865	5.449.135	0	2.088.795.000	75.000.000	1.979.720.315	10.052.995	0	1.989.773.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01	UPT LABORATORIUM KESEHATAN	650.000.000	3.081.672.476	242.568.000	0	3.324.240.476	500.000.000	3.028.750.292	135.623.160	0	3.164.373.452
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA MASYARAKAT	3.000.000	2.309.569.965	383.256.100	0	2.692.826.065	3.000.000	2.071.978.665	486.207.400	0	2.558.186.065
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG	7.000.000.000	8.872.097.184	0	0	8.872.097.184	3.410.500.000	8.302.450.687	255.450.000	0	8.557.900.687
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	130.000.000.000	332.980.114.865	94.004.169.346	0	426.984.284.211	244.767.243.999	423.713.704.192	181.592.349.406	0	605.306.053.598
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	23.000.000.000	65.493.510.568	7.483.614.683	0	72.977.125.251	27.000.000.000	67.028.029.408	8.848.543.070	0	75.876.572.478



KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKIDA
<i>Cen</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>






1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	236.691.177.390	376.999.617.373	0	0	0	613.690.794.763	0	288.981.389.001	448.471.983.408	0	0	737.453.372.409
1 03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	236.691.177.390	376.999.617.373	0	0	0	613.690.794.763	0	288.981.389.001	448.471.983.408	0	0	737.453.372.409
1 03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	354.393.905.869	544.943.000	0	0	0	354.988.848.869	0	355.474.787.400	862.410.470	0	0	356.337.197.870
1 04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	354.393.905.869	544.943.000	0	0	0	354.988.848.869	0	355.474.787.400	862.410.470	0	0	356.337.197.870
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	30.136.712.859	684.196.000	0	0	0	30.820.908.859	0	30.893.769.673	1.250.542.900	0	0	32.144.312.573
1 05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	20.880.090.700	684.196.000	0	0	0	21.564.286.700	0	21.507.824.819	930.522.900	0	0	22.438.347.719
1 05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	9.256.622.159	0	0	0	0	9.256.622.159	0	9.385.944.854	320.020.000	0	0	9.705.964.854
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	36.782.165.870	543.471.500	0	0	0	37.325.637.370	0	36.850.375.861	719.643.940	0	0	37.570.019.801
1 06	DINAS SOSIAL	0	31.175.367.669	257.568.000	0	0	0	31.432.935.669	0	31.250.173.198	504.493.940	0	0	31.754.667.138
1 06	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULLA DHARMA	0	3.353.177.700	95.154.300	0	0	0	3.448.332.000	0	3.455.615.300	24.400.800	0	0	3.480.016.100
1 06	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06	UPT PANTI SOSIAL ANAK	0	2.253.620.501	190.749.200	0	0	0	2.444.369.701	0	2.144.587.363	190.749.200	0	0	2.335.336.563

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKIDA
			

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.330.863.000	303.619.460.173	21.212.037.542	0	0	0	324.831.497.715	825.648.000	310.152.136.051	26.496.074.517	0	0	336.648.210.568
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	410.000.000	36.110.038.582	406.962.300	0	0	0	36.517.000.882	400.000.000	28.007.100.817	921.109.635	0	0	28.928.210.452
2 07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.000.000	34.423.628.324	183.342.400	0	0	0	34.606.970.724	0	26.501.446.357	616.334.435	0	0	27.117.780.792
2 07	UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	400.000.000	1.686.410.258	223.619.900	0	0	0	1.910.030.158	400.000.000	1.505.654.460	304.775.200	0	0	1.810.429.660
2 07	UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 07	UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 07	UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 07	UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	11.856.385.230	60.573.300	0	0	0	11.916.958.530	0	12.194.457.351	85.052.635	0	0	12.279.509.986
2 08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	11.300.993.950	60.573.300	0	0	0	11.361.567.250	0	11.651.762.071	85.052.635	0	0	11.736.814.706
2 08	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	555.391.280	0	0	0	0	555.391.280	0	542.695.280	0	0	0	542.695.280
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	18.617.332.623	1.256.139.335	0	0	0	19.873.471.958	0	28.515.127.329	549.259.935	0	0	29.064.387.264
2 09	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	18.617.332.623	1.256.139.335	0	0	0	19.873.471.958	0	28.515.127.329	549.259.935	0	0	29.064.387.264
2 09	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKASA	ASISTEN I	SEKDA
		F	I

2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	1.248.615.800	0	0	0	0	0	1.248.615.800	0	1.047.916.800	0	0	1.047.916.800
2 10	1.04.2.10.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1.248.615.800	0	0	0	0	0	1.248.615.800	0	1.047.916.800	0	0	1.047.916.800
2 10	4.01.00.00.01.0001	BIRO PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000	62.291.354.140	3.693.746.420	0	0	0	0	65.985.100.560	0	56.564.428.709	0	3.671.860.441	60.236.289.150
2 11	2.11.3.28.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.000.000	55.779.589.068	1.500.360.500	0	0	0	0	57.279.949.568	0	50.540.347.168	0	1.367.713.100	51.908.060.268
2 11	2.11.3.28.00.01.0001	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS	0	545.106.500	254.893.500	0	0	0	0	800.000.000	0	538.485.500	0	226.128.500	764.614.000
2 11	2.11.3.28.00.01.0002	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG	0	570.338.400	48.222.700	0	0	0	0	618.561.100	0	537.667.100	0	35.000.000	572.667.100
2 11	2.11.3.28.00.01.0003	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAAH	0	459.456.020	179.320.000	0	0	0	0	638.776.020	0	459.456.020	0	179.320.000	638.776.020
2 11	2.11.3.28.00.01.0006	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI	0	527.983.219	108.018.800	0	0	0	0	636.002.019	0	495.973.433	0	107.807.485	603.780.918
2 11	2.11.3.28.00.01.0007	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG	0	555.173.418	25.322.800	0	0	0	0	580.496.218	0	340.124.007	0	215.259.400	555.383.407
2 11	2.11.3.28.00.01.0008	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA	0	540.329.860	258.470.700	0	0	0	0	798.800.560	0	519.139.860	0	244.470.700	763.610.560
2 11	2.11.3.28.00.01.0009	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN	0	564.315.500	198.085.000	0	0	0	0	762.401.500	0	547.696.400	0	181.386.000	729.082.400
2 11	2.11.3.28.00.01.0010	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU	0	506.591.636	224.971.868	0	0	0	0	731.563.504	0	494.537.406	0	204.841.504	699.378.910
2 11	2.11.3.28.00.01.0013	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR	0	521.713.000	221.269.171	0	0	0	0	742.982.171	0	481.784.191	0	229.413.871	711.198.062

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKIDA
			

2 11	2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA	0	609.616.700	187.776.900	0	0	0	0	797.393.600	0	559.638.520	202.986.400	0	0	762.624.920
2 11	2.11.3.28.0.00.01.0015	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA	0	547.441.419	252.558.581	0	0	0	0	800.000.000	0	502.001.419	262.558.581	0	0	764.560.000
2 11	2.11.3.28.0.00.01.0016	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR	0	563.699.400	234.474.900	0	0	0	0	798.174.300	0	547.577.685	214.974.900	0	0	762.552.585
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	10.479.377.304	91.442.200	0	0	0	0	10.570.819.504	0	10.593.324.123	91.442.200	0	0	10.684.766.323
2 12	2.12.2.14.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	10.479.377.304	91.442.200	0	0	0	0	10.570.819.504	0	10.593.324.123	91.442.200	0	0	10.684.766.323
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	15.095.151.365	0	0	0	0	0	15.095.151.365	0	14.831.408.574	65.697.648	0	0	14.897.106.222
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	15.095.151.365	0	0	0	0	0	15.095.151.365	0	14.831.408.574	65.697.648	0	0	14.897.106.222
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	87.184.500	0	0	0	0	0	87.184.500	0	87.184.500	0	0	0	87.184.500
2 14	2.14.2.12.2.14.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	87.184.500	0	0	0	0	0	87.184.500	0	87.184.500	0	0	0	87.184.500
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.383.000	24.191.235.208	1.030.980.800	0	0	0	0	25.222.216.008	29.983.000	23.324.324.451	1.230.704.750	0	0	24.555.029.201
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	33.383.000	24.191.235.208	1.030.980.800	0	0	0	0	25.222.216.008	29.983.000	23.324.324.451	1.230.704.750	0	0	24.555.029.201

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAYAKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	24.476.374.055	6.950.556.200	0	0	0	31.426.930.255	0	28.495.690.116	6.739.934.600	0	0	35.235.624.716
2 16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	24.476.374.055	6.950.556.200	0	0	0	31.426.930.255	0	28.495.690.116	6.739.934.600	0	0	35.235.624.716
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.000.000	18.271.980.615	936.462.100	0	0	0	19.208.442.715	6.000.000	16.505.877.048	801.557.000	0	0	17.307.434.048
2 17	2.17.0.00.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.000.000	18.271.980.615	936.462.100	0	0	0	19.208.442.715	6.000.000	16.505.877.048	801.557.000	0	0	17.307.434.048
2 17	2.17.0.00.00.01.0001	UPT PELATIHAN KOPERASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	300.000.000	13.258.190.054	543.387.620	0	0	0	13.801.577.674	332.000.000	12.317.083.228	466.000.420	0	0	12.783.083.648
2 18	2.18.0.00.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	300.000.000	13.258.190.054	543.387.620	0	0	0	13.801.577.674	332.000.000	12.317.083.228	466.000.420	0	0	12.783.083.648
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	564.480.000	38.970.479.894	931.359.367	0	0	0	39.901.839.261	57.665.000	42.031.122.374	6.553.856.832	0	0	48.584.979.206
2 19	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARAWISATA	564.480.000	38.970.479.894	931.359.367	0	0	0	39.901.839.261	57.665.000	42.031.122.374	6.553.856.832	0	0	48.584.979.206
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	361.419.600	0	0	0	0	361.419.600	0	343.348.400	0	0	0	343.348.400
2 20	2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	361.419.600	0	0	0	0	361.419.600	0	343.348.400	0	0	0	343.348.400
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	208.483.600	0	0	0	0	208.483.600	0	429.156.900	0	0	0	429.156.900
2 21	2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	208.483.600	0	0	0	0	208.483.600	0	429.156.900	0	0	0	429.156.900
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	10.801.455.360	0	0	0	0	10.801.455.360	0	18.515.512.290	53.011.621	0	0	18.568.523.911
2 22	2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	10.801.455.360	0	0	0	0	10.801.455.360	0	18.515.512.290	53.011.621	0	0	18.568.523.911
2 22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	6.981.030.700	0	0	0	0	6.981.030.700	0	14.701.726.800	0	0	0	14.701.726.800

KARO HUKUM	PERANGKAT BARU PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKIDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2 22	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPT TAMAN BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 22	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPT MUSEUM	0	3.820.424.660	0	0	3.820.424.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.866.797.111
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	16.701.836.743	5.217.927.900	0	0	21.919.764.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.992.436.641
2 23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	16.701.836.743	5.217.927.900	0	0	21.919.764.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.992.436.641
2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	592.565.500	92.500.000	0	0	685.065.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.223.200
2 24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	592.565.500	92.500.000	0	0	685.065.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.223.200
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.937.770.000	222.020.322.906	41.147.151.842	0	0	263.167.474.748	0	0	1.466.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.383.462.451
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	235.000.000	40.408.569.268	2.268.282.694	0	0	42.676.851.962	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.076.536.768
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000	34.733.853.995	562.989.600	0	0	35.296.843.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.332.558.094
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT	100.000.000	2.190.362.770	637.371.300	0	0	2.827.734.070	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.452.270
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPT PELABUHAN PERIKANAN	100.000.000	3.484.352.503	1.067.921.794	0	0	4.552.274.297	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052.526.404
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	11.478.305.474	0	0	0	11.478.305.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.698.081.874
3 26	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	11.478.305.474	0	0	0	11.478.305.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.698.081.874
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.402.770.000	109.885.134.317	2.747.374.200	0	0	112.632.508.517	0	0	816.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.119.638.216
3 27	2.09.3.27.0.00.01.0002	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	106.000.000	62.267.283.834	1.359.348.000	0	0	64.626.633.834	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.358.268.843

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKASIA	ASISTEN I	ESKDA



3 27	3.27.0.00.0.00.01.0001	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	241.100.000	5.554.278.653	938.007.100	0	0	0	6.492.285.753	241.100.000	5.501.820.811	658.494.818	0	0	6.160.315.629
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0002	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	1.802.982.821	73.290.900	0	0	0	1.876.273.721	0	1.712.982.821	73.290.900	0	0	1.786.273.721
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0003	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0004	UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0005	UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 27	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	770.670.000	36.354.923.258	280.576.000	0	0	0	36.635.499.258	240.000.000	29.724.997.598	230.865.500	0	0	29.955.863.098
3 27	3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	110.000.000	1.413.940.940	87.874.500	0	0	0	1.501.815.440	110.000.000	1.342.378.940	87.874.500	0	0	1.430.253.440
3 27	3.27.0.00.0.00.02.0002	UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN	175.000.000	1.491.722.811	8.277.700	0	0	0	1.500.000.511	175.000.000	1.420.385.785	8.277.700	0	0	1.428.663.485
3 28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	21.188.237.422	34.399.290.848	0	0	0	55.587.528.270	0	21.009.975.136	28.827.724.819	0	0	49.837.699.955
3 28	2.11.3.28.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	6.416.870.790	33.302.274.100	0	0	0	39.719.144.890	0	6.480.530.716	27.889.893.089	0	0	34.370.423.805
3 28	2.11.3.28.0.00.01.0001	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS	0	675.175.000	24.825.000	0	0	0	700.000.000	0	666.799.000	24.825.000	0	0	691.624.000
3 28	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG	0	831.438.900	0	0	0	0	831.438.900	0	830.870.900	0	0	0	830.870.900
3 28	2.11.3.28.0.00.01.0003	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH	0	677.261.780	111.622.100	0	0	0	788.883.880	0	666.763.780	74.352.700	0	0	741.116.480
3 28	2.11.3.28.0.00.01.0004	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK	0	1.232.531.250	267.468.750	0	0	0	1.500.000.000	0	1.217.602.050	242.353.750	0	0	1.459.955.800

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

3 28 2.11.3.28.0.00.01.0005	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA	0	1.199.787.632	250.212.368	0	0	0	1.450.000.000	0	1.206.904.500	191.312.500	0	0	1.398.217.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0006	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI	0	765.342.300	50.137.700	0	0	0	815.480.000	0	784.078.300	18.637.700	0	0	802.716.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0007	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG	0	641.000.000	9.000.000	0	0	0	650.000.000	0	630.054.000	9.000.000	0	0	639.054.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0008	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA	0	699.485.000	515.000	0	0	0	700.000.000	0	685.517.000	515.000	0	0	686.032.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0009	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN	0	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	686.160.400	0	0	0	686.160.400
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0010	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU	0	647.682.800	2.317.200	0	0	0	650.000.000	0	636.342.800	2.317.200	0	0	638.660.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0011	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT	0	1.459.999.960	40.000.040	0	0	0	1.500.000.000	0	1.394.984.960	56.500.040	0	0	1.451.485.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0012	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR	0	1.311.971.500	120.609.100	0	0	0	1.432.580.600	0	1.267.606.470	120.609.100	0	0	1.388.215.570
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0013	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR	0	657.911.600	42.088.400	0	0	0	700.000.000	0	654.595.000	33.850.000	0	0	688.445.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA	0	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	686.867.000	0	0	0	686.867.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0015	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA	0	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	0	638.800.000	0	0	0	638.800.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0016	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR	0	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	0	638.871.000	0	0	0	638.871.000
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN	0	1.271.778.910	178.221.090	0	0	0	1.450.000.000	0	1.236.627.260	163.558.740	0	0	1.400.186.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


3 29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	300.000.000	29.666.844.725	256.708.900	0	0	0	29.923.553.625	300.000.000	24.253.032.228	639.504.550	0	0	24.892.536.778
3 29	3.29.0.00.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 29	3.29.3.30.3.31.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	29.666.844.725	256.708.900	0	0	0	29.923.553.625	0	24.253.032.228	639.504.550	0	0	24.892.536.778
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	5.895.831.700	1.475.495.200	0	0	0	7.371.326.900	0	10.053.798.540	1.476.757.400	0	0	11.530.555.940
3 30	3.30.3.29.3.30.3.31.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	3.443.005.700	0	0	0	0	3.443.005.700	0	7.793.421.800	0	0	0	7.793.421.800
3 30	3.30.3.30.3.30.3.31.01.0001	UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	0	2.452.826.000	1.475.495.200	0	0	0	3.928.321.200	0	2.260.376.740	1.476.757.400	0	0	3.737.134.140
3 31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	2.876.919.100	0	0	0	0	2.876.919.100	0	2.557.886.420	0	0	0	2.557.886.420
3 31	3.31.3.29.3.30.3.31.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	2.876.919.100	0	0	0	0	2.876.919.100	0	2.557.886.420	0	0	0	2.557.886.420
3 31	3.31.3.31.3.30.0.00.01.0001	UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	620.480.900	0	0	0	0	620.480.900	0	670.526.500	0	0	0	670.526.500
3 32	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	620.480.900	0	0	0	0	620.480.900	0	670.526.500	0	0	0	670.526.500
4		UNSUB POKOK URUSAN PEMERINTAHAN	12.000.000	309.045.126.542	2.421.025.668	0	0	0	311.466.152.210	12.000.000	315.566.454.606	9.893.432.738	0	0	325.459.887.344
4 01		SEKRETARIAT DAERAH	12.000.000	182.389.220.442	2.402.311.768	0	0	0	184.791.532.210	12.000.000	192.626.348.070	8.817.235.138	0	0	201.443.583.208

KABUPATEN HIDUP	PELAKSANA DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA

4 01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	0	89.913.444.753	1.922.916.068	0	0	0	91.836.360.821	0	85.039.934.884	8.220.097.224	0	0	93.260.032.108
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BIRO PEMERINTAHAN	0	3.407.839.025	0	0	0	0	3.407.839.025	0	3.845.961.874	0	0	0	3.845.961.874
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BIRO HUKUM	0	3.463.068.975	0	0	0	0	3.463.068.975	0	3.289.913.595	0	0	0	3.289.913.595
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	65.771.849.400	0	0	0	0	65.771.849.400	0	78.111.104.981	0	0	0	78.111.104.981
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BIRO PEREKONOMIAN	0	1.964.279.123	1.617.400	0	0	0	1.965.896.523	0	1.993.558.197	0	0	0	1.993.558.197
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	6.251.054.316	413.692.800	0	0	0	6.664.747.116	0	6.714.241.710	530.137.914	0	0	7.244.379.624
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	1.429.985.782	49.085.500	0	0	0	1.479.071.282	0	1.303.959.318	20.000.000	0	0	1.323.959.318
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BIRO ORGANISASI	0	3.158.176.796	15.000.000	0	0	0	3.173.176.796	0	2.911.172.956	0	0	0	2.911.172.956
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BIRO UMUM	12.000.000	2.419.527.253	0	0	0	0	2.419.527.253	12.000.000	3.714.689.790	47.000.000	0	0	3.761.689.790
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	4.609.995.019	0	0	0	0	4.609.995.019	0	5.701.810.765	0	0	0	5.701.810.765
4 02		SEKRETARIAT DPRD	0	126.655.906.100	18.713.900	0	0	0	126.674.620.000	0	122.940.106.536	1.076.197.600	0	0	124.016.304.136
4 02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	126.655.906.100	18.713.900	0	0	0	126.674.620.000	0	122.940.106.536	1.076.197.600	0	0	124.016.304.136
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.227.681.077.527	259.624.767.500	6.475.787.135	30.000.000.000	1.152.032.982.745	1.448.133.537.380	5.380.259.153.089	5.377.417.313.089	255.885.090.600	10.602.336.658	9.850.504.054	1.195.641.092.210	1.471.979.023.522
5 01		PERENCANAAN	0	21.221.918.650	309.185.178	0	0	0	21.531.103.828	0	22.479.245.630	942.601.378	0	0	23.421.847.008
5 01	5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	21.221.918.650	309.185.178	0	0	0	21.531.103.828	0	22.479.245.630	942.601.378	0	0	23.421.847.008
5 02		KEUANGAN	5.226.492.227.527	167.277.167.294	2.774.076.865	30.000.000.000	1.152.032.982.745	1.352.084.228.904	5.377.417.313.089	163.584.132.533	106.355.509.789	5.210.146.230	9.850.504.054	1.195.641.092.210	1.374.285.875.027
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.369.852.581.063	106.581.614.639	364.107.600	0	0	0	106.945.722.239	1.042.037.427.441	106.355.509.789	2.063.957.765	0	0	108.419.467.574
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0001	UPT PELAYANAN DAERAH PONTIATAK WILAYAH I	0	2.725.897.500	74.002.400	0	0	0	2.799.899.900	578.687.485.734	2.714.467.505	206.170.450	0	0	2.920.637.955
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0002	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG	0	2.693.753.850	406.104.500	0	0	0	3.099.858.350	217.165.831.300	2.391.766.132	557.604.500	0	0	2.949.370.632
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0003	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH	0	1.675.728.998	147.074.000	0	0	0	1.822.802.898	97.150.737.400	1.596.245.353	135.417.400	0	0	1.731.662.753

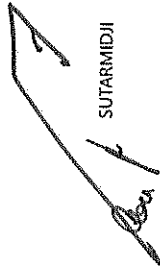
KARO FUDUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA

5 02	5.02.0.00.0.00.01.0004	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU	0	1.785.348.752	279.137.000	0	0	2.064.485.752	146.803.088.500	1.748.740.464	217.552.000	0	0	1.966.292.464
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0005	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG	0	1.907.638.374	92.361.404	0	0	1.999.999.778	134.530.615.000	1.812.652.674	92.361.404	0	0	1.905.014.078
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0006	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU	0	1.317.863.000	18.614.000	0	0	1.336.477.000	44.878.160.000	1.255.950.150	18.614.000	0	0	1.274.564.150
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0007	UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG	0	1.858.306.130	141.693.870	0	0	2.000.000.000	188.442.741.700	1.847.982.100	57.678.900	0	0	1.905.661.000
5 02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.856.639.646.464	46.731.016.151	1.250.984.091	30.000.000.000	1.152.032.982.745	1.230.014.982.987	2.927.721.226.014	43.860.818.366	1.860.789.791	9.850.504.054	1.195.641.092.210	1.251.213.204.421
5 03		KEPEGAWAIAN	0	15.963.422.890	404.482.000	0	0	16.367.904.890	0	17.325.940.661	588.947.500	0	0	17.914.888.161
5 03	5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	15.963.422.890	404.482.000	0	0	16.367.904.890	0	17.325.940.661	588.947.500	0	0	17.914.888.161
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.088.850.000	27.022.824.438	2.086.610.842	0	0	29.109.435.280	2.741.840.000	25.779.378.164	2.136.208.400	0	0	27.915.586.564
5 04	5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.088.850.000	27.022.824.438	2.086.610.842	0	0	29.109.435.280	2.741.840.000	25.779.378.164	2.136.208.400	0	0	27.915.586.564
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	14.978.482.819	475.271.650	0	0	15.453.754.469	0	14.462.809.536	992.828.750	0	0	15.455.638.286
5 05	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	14.978.482.819	475.271.650	0	0	15.453.754.469	0	14.462.809.536	992.828.750	0	0	15.455.638.286
5 06		PENGLOLAAN PERBATASAN	0	6.966.802.501	402.258.100	0	0	7.369.060.601	0	6.290.702.500	441.715.900	0	0	6.732.418.400
5 06	5.06.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	6.966.802.501	402.258.100	0	0	7.369.060.601	0	6.290.702.500	441.715.900	0	0	6.732.418.400
5 07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	100.000.000	6.194.148.908	23.900.500	0	0	6.218.049.408	100.000.000	5.962.881.576	289.888.500	0	0	6.252.770.076
5 07	5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	100.000.000	6.194.148.908	23.900.500	0	0	6.218.049.408	100.000.000	5.962.881.576	289.888.500	0	0	6.252.770.076
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	37.066.797.284	34.413.600	0	0	37.101.210.884	0	37.271.939.110	124.413.600	0	0	37.396.352.710
6 01		INSPEKTORAT DAERAH	0	37.066.797.284	34.413.600	0	0	37.101.210.884	0	37.271.939.110	124.413.600	0	0	37.396.352.710
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	37.066.797.284	34.413.600	0	0	37.101.210.884	0	37.271.939.110	124.413.600	0	0	37.396.352.710

KABUPATEN HUTUH	PELAYANAN DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA
	f	w	l

8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	17.347.833.338	88.196.800	0	0	17.436.030.138	0	36.344.493.805	379.136.600	0	0	36.723.630.405
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	17.347.833.338	88.196.800	0	0	17.436.030.138	0	36.344.493.805	379.136.600	0	0	36.723.630.405
8 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	17.347.833.338	88.196.800	0	0	17.436.030.138	0	36.344.493.805	379.136.600	0	0	36.723.630.405
<b>TOTAL</b>		<b>5.392.933.970.527</b>	<b>3.605.734.765.576</b>	<b>896.649.751.630</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>1.152.032.982.745</b>	<b>5.684.417.499.951</b>	<b>5.658.492.045.088</b>	<b>3.710.462.990.531</b>	<b>1.078.698.042.800</b>	<b>9.850.504.054</b>	<b>1.195.641.092.210</b>	<b>5.994.652.629.595</b>

Gubernur Kalimantan Barat



SUTARMIDI